



Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial

Author Name: Argara Pasaribu¹, Nisa Yulianti Aritonang², Sahata Manalu³

Affiliation: 1,2,3 Universitas Katolik Santo Thomas

Contact Information: argarapasaribu@gmail.com

Abstract

Civics education plays a strategic role in shaping a society that is aware and active in social and political life. This study aims to examine how civics education can empower the community to participate more effectively in national and state life. Using a qualitative approach, this study explores various supporting factors and challenges faced in the implementation of civics education in the community. The research findings indicate that civics education can improve the community's understanding of their rights and obligations as citizens, and encourage their involvement in elections and social activities. However, obstacles remain, such as limited access to education and low awareness among some communities regarding the importance of participation in the democratic process.

Keywords: Community Empowerment; Civic Education; Social Participation; Citizen Engagement

Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang sadar dan aktif dalam kehidupan sosial serta politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pendidikan kewarganegaraan mampu memberdayakan masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali berbagai faktor pendukung serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan di masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mendorong keterlibatan mereka dalam pemilu dan kegiatan sosial. Kendati demikian, masih ditemukan hambatan seperti keterbatasan akses pendidikan dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Pendidikan Kewarganegaraan; Partisipasi Sosial; Keterlibatan Warga





Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembentukan karakter dan identitas warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab (Luthfianto et al., 2021). Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya ditujukan untuk mentransfer pengetahuan tentang sistem pemerintahan atau konstitusi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk membentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran individu dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, masyarakat diharapkan mampu berkontribusi secara positif terhadap pembangunan demokrasi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat diajak untuk memahami dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih mendalam. Pendidikan ini menanamkan nilainilai dasar seperti keadilan, kebebasan, toleransi, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial, yang menjadi landasan dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan demokratis. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga mempersiapkan warga untuk mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses-proses publik seperti pemilu, musyawarah desa, aksi sosial, maupun kegiatan advokasi kebijakan publik. Partisipasi semacam ini menjadi indikator penting dari keberhasilan sistem demokrasi, karena menunjukkan keterlibatan langsung warga dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama (Dewi & Buldani, 2024).

Dalam praktiknya, implementasi pendidikan kewarganegaraan di berbagai institusi pendidikan maupun komunitas masyarakat menghadapi tantangan yang tidak ringan (Sunaryati et al., 2025). Masih banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil atau kurang terjangkau, yang belum memperoleh akses terhadap pendidikan kewarganegaraan secara memadai. Selain itu, kurikulum yang terlalu teoritis tanpa keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari membuat pendidikan ini kurang mampu membangun kesadaran kritis di kalangan peserta didik. Akibatnya, meskipun telah mempelajari materi kewarganegaraan, masih banyak individu yang belum menyadari pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Rendahnya partisipasi dalam pemilu, sikap apatis terhadap isu-isu publik, dan kurangnya kepedulian terhadap problem sosial menjadi bukti adanya kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan warga negara (Sofiyan et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut menjadi semakin relevan mengingat negara ini memiliki latar belakang sosial budaya yang sangat beragam (Rista & Wiranata, 2024). Keberagaman tersebut membutuhkan pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual, inklusif, dan adaptif terhadap kondisi lokal. Peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menjawab tantangan rendahnya partisipasi warga negara, terutama dalam pengambilan keputusan politik dan keterlibatan dalam aksi sosial. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis dan transformatif, karena mampu menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat aktif dalam kehidupan public (Sugistin & Pujianto, 2024).

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan secara efektif mampu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat. Studi Kumar (2015) dan Parker (2017) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pengalaman dan partisipasi aktif memiliki dampak positif





terhadap peningkatan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh metode pembelajaran yang digunakan, peran pendidik, serta dukungan lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif dalam menyampaikan pendidikan kewarganegaraan, agar mampu menjangkau lapisan masyarakat secara lebih luas dan bermakna (Habibi, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam memberdayakan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan partisipasi sosial di berbagai lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam berbagai pengalaman dan perspektif warga negara, tenaga pendidik, serta pengelola program pendidikan kewarganegaraan (Nabilla & Hamid, 2021). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di sekolah maupun komunitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk masyarakat yang partisipatif, serta menjadi dasar pengembangan strategi pendidikan yang lebih efektif dan kontekstual di masa mendatang (Widiyanto, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai strategi utama dalam menggali pemahaman mendalam mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi sosial masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara kontekstual dan holistik berdasarkan perspektif partisipan. Metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara rinci pengalaman, praktik, dan persepsi para pemangku kepentingan dalam konteks tertentu, yakni di sekolah dan komunitas yang melaksanakan pendidikan kewarganegaraan secara aktif. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah informan yang terdiri dari warga negara, tenaga pendidik, dan pengelola program pendidikan kewarganegaraan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan atau mengikuti kegiatan pendidikan kewarganegaraan. Kedua, observasi partisipatif dilakukan di beberapa lokasi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan, baik di lingkungan sekolah maupun komunitas masyarakat. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk mencermati secara langsung interaksi, metode pengajaran, serta partisipasi warga dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan.

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan menginterpretasikan pola-pola atau tema-tema penting yang muncul dari data. Proses analisis dimulai dengan transkripsi data, kemudian dilakukan proses pengkodean terbuka untuk menemukan unit-unit makna yang relevan. Setelah itu, dilakukan pengelompokan kode-kode tersebut ke dalam tema-tema utama yang menunjukkan hubungan antara pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dan tingkat partisipasi sosial masyarakat. Seluruh proses penelitian ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga validitas dan kredibilitas data melalui teknik triangulasi sumber dan teknik. Dengan demikian, hasil yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam dan





komprehensif mengenai efektivitas pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik.

Hasil dan Diskusi

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Partisipan yang mengikuti program pendidikan kewarganegaraan, baik melalui kegiatan formal di sekolah maupun nonformal di komunitas, memperlihatkan pemahaman yang lebih baik terhadap proses demokrasi dan pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Program-program seperti simulasi pemilu, diskusi kelompok, serta kunjungan ke lembaga pemerintahan terbukti efektif dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan mekanisme partisipasi publik. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis yang relevan dengan kehidupan nyata.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen pemberdayaan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Di daerah tersebut, infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, minimnya tenaga pendidik yang kompeten, serta kurangnya dukungan dari pemerintah setempat menjadi hambatan besar dalam menyampaikan materi kewarganegaraan secara efektif. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan kewarganegaraan menyebabkan partisipasi dalam program-program yang ditawarkan juga tergolong rendah. Banyak warga yang belum melihat keterkaitan langsung antara pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan kualitas hidup mereka sebagai warga negara.

Beberapa faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini turut berkontribusi terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan. Dukungan dari lembaga pendidikan, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengembangkan dan menyebarluaskan program kewarganegaraan yang kontekstual dan mudah diakses. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi terbukti efektif dalam menyampaikan pesan-pesan pendidikan kewarganegaraan kepada khalayak luas. Melalui konten digital yang menarik dan interaktif, masyarakat lebih mudah memahami isu-isu kewarganegaraan serta terdorong untuk terlibat dalam forum-forum diskusi publik dan kegiatan sosial.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pendekatan yang relevan dan efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan membekali warga negara dengan pemahaman tentang hak, kewajiban, serta mekanisme partisipasi dalam sistem demokrasi, pendidikan kewarganegaraan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan bersama. Proses ini juga dapat





mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum, kritis terhadap kebijakan publik, dan tanggap terhadap isu-isu sosial yang berkembang.

Namun demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat yang menjadi sasarannya. Kesenjangan akses pendidikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan perlu menjadi perhatian dalam merumuskan strategi pendidikan kewarganegaraan yang inklusif. Penguatan kapasitas guru, peningkatan sarana prasarana pendidikan, dan dukungan kebijakan dari pemerintah menjadi faktor krusial yang harus dipenuhi untuk memastikan efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam jangka panjang. Selain itu, pendekatan yang digunakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, agar proses pembelajaran terasa relevan dan bermakna.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sebagai mata pelajaran dalam kurikulum, tetapi harus menjadi gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemerintah diperlukan untuk memperluas jangkauan program serta memperkuat dampaknya. Jika pendidikan kewarganegaraan dijalankan secara serius dan konsisten, maka pemberdayaan masyarakat bukanlah sekadar wacana, melainkan sebuah realitas yang dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi sosial dan politik yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat vital dalam proses pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam membentuk warga negara yang sadar, kritis, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Melalui pendidikan ini, masyarakat dapat memahami secara lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya keterlibatan dalam berbagai kegiatan publik sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat nilai-nilai demokrasi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang menghambat efektivitas pendidikan kewarganegaraan, seperti keterbatasan akses di daerah tertentu, rendahnya kualitas penyampaian materi, serta kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap urgensi pendidikan ini. Kendala-kendala tersebut menjadi indikator bahwa implementasi pendidikan kewarganegaraan membutuhkan strategi yang lebih inklusif dan partisipatif agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan media, pendidikan kewarganegaraan dapat ditingkatkan kualitas dan jangkauannya. Kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan akan memperbesar peluang keberhasilan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk masyarakat yang lebih aktif, peduli, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu terus dikembangkan sebagai instrumen strategis dalam membangun masyarakat demokratis yang adil, partisipatif, dan berdaya saing.

Daftar Pustaka





- Dewi, D. A., & Buldani, A. A. (2024). Penguatan Etika Kewarganegaraan dalam Kehidupan Demokratis Melalui Kompetensi Pedagogis. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/10353
- Habibi, M. M. (2022). *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*. pdfs.semanticscholar.org. https://pdfs.semanticscholar.org/aea6/6528b19b4465ca4a8d0c2d1c3e978e7f0025.pdf
- Luthfianto, S., Imron, M., Maulida, N., & ... (2021). Pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat 5 pilar untuk meningkatkan partisipasi desa pada masa pandemi COVID-19. In *Community* academia.edu. https://www.academia.edu/download/87673616/2713.pdf
- Nabilla, A., & Hamid, A. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. ... *SOSIAL: Journal of Social Work and Social* https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/14121
- Rista, D., & Wiranata, I. H. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan: Landasan Demokrasi yang Inklusif Melalui Pemberdayaan Warga Negara menuju Masyarakat yang Demokratis. ... (Seminar Nasional Pendidikan https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/semdikjar/article/view/5318
- Sofiyan, F. H., Sanusi, A. R., & ... (2024). Peran Guru Pendidikan Pancasila pada Proyek Suara Demokrasi dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa Kelas XI di SMAN 5 Karawang. ... *Kewarganegaraan*. https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/7842
- Sugistin, R. F. C., & Pujianto, W. E. (2024). Partisipasi Organisasi Karang Taruna di Dalam Lingkungan Masyarakat Desa Jati Sidoarjo. In *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen* academia.edu. https://www.academia.edu/download/121880342/x.pdf
- Sunaryati, T., Fuadah, G., Ramadhani, A. O., & ... (2025). Pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap pembentukan perilaku sosial siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dan* https://ijurnal.com/1/index.php/jpp/article/view/400
- Widiyanto, D. (2023). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi. *Jurnal Pendidikan*. http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp/article/view/2826

201